

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini diatur dalam UU 36/2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Usaha pemerintah dalam mewujudkannya telah dimulai dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (Buku Pegangan Sosialisasi 2013).

Namun usaha untuk memenuhi hak setiap orang terhadap kesehatan masih sangat jauh, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum termasuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan. Mengatasi hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Pramana 2015).

JKN diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (Depkes 2016).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017 didapatkan data keseluruhan peserta JKN dengan katagori PBPU pada tahun 2017 terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Puger yaitu sebanyak 5.19%, jumlah tersebut termasuk dalam jumlah peserta JKN kategori PBPU terbanyak dari 49 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut didapatkan data dari kantor BPJS Jember menunjukkan keseluruhan PBPU di wilayah kerja puskesmas puger yang mencakup 5 desa yaitu berjumlah 3.712 jiwa, akan tetapi yang terdaftar menjadi peserta PBPU sampai bulan Januari 2017 hanya sebesar 24.73% atau 920 jiwa. Data tersebut tersebar di desa Puger Kulon sebanyak 33,52%, Puger Wetan sebanyak 21.28%, Grenden sebanyak 12.83%, Mojosari sebanyak 22.12%, dan Mujomulyo sebanyak 9,35%.Data tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2017 wilayah kerja Puskesmas Puger memiliki minat rendah mengikuti JKN. Dan 6 dari 10 (60%) masyarakat di wilayah kerja puskesmas puger memiliki persepsi negatif tentang pelaksanaan JKN khususnya katagori peserta PBPU.

Penelitian yang dilakukan Puspita (2015) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) di wilayah kerja puskesmas Prajekan Bondowoso cukup baik. Akan tetapi 7 dari 10 masyarakat pengguna JKN masih terkendala pembayaran setiap bulannya.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil judul “Hubungan Persepsi Masyarakat Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dengan Minat Mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional Diwilayah Kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember”.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Usaha untuk memenuhi hak setiap orang terhadap kesehatan masih sangat jauh, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum termasuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan. Mengatasi hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jember, khususnya di wilayah Puskesmas Puger angka pengguna JKN PBPU masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 920 jiwa yang seharusnya 3.713. dari data tersebut menunjukkan minat mengikuti JKN katagori PBPU masih rendah.

Banyak masyarakat kita yang tidak mengikuti program ini dikarenakan faktor tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat, minimnya informasi yang didapat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Pertanyaan Masalah

Adakah hubungan persepsi masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah dengan minat mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengkaji adanya hubungan persepsi masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah dengan minat mengikuti jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi persepsi masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah tentang JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember tahun 2016.
- b. Mengidentifikasi minat mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember tahun 2016.
- c. Menganalisis hubungan persepsi masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah dengan minat mengikuti jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Puger Kabupaten Jember tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana menambah pengalaman, Serta Sebagai referensi mengenai persepsi masyarakat PBPU dengan minat mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Institusi BPJS

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi petugas BPJS untuk mengetahui besar minat masyarakat PBPU untuk mengikuti JKN.

3. Bagi Puskesmas

Bermanfaat untuk mengetahui jumlah PBPU diwilayah kerja Puskesmas Puger serta mengetahui minat masyarakat Puger mengikuti program PBPU.

4. Bagi FIKES UNMUH Jember.

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keperawatan, khususnya dalam manajemen keperawatan.